

ABSTRAK

OLEH
SUARDIN LASE
13.840.0031

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna dalam penelitian perkembangan ilmu pengetahuan farmasi atau *farmakologi*. Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan peredaran atau penyalahgunaan narkotika termasuk dalam tindak pidana. Rumusan masalah adalah bagaimana penegakan hukum berdasarkan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika, hambatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Untuk membahas masalah ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis, dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan mengambil Putusan No: 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn yaitu kasus tindak pidana narkotika yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan untuk penegakan hukum berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116, pengedar atau perantara ketentuan pidana berdasarkan pasal 114, produsen ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 UU No 35 tahun 2009. Hambatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika, secara umum yaitu : Kurang memadainya kemampuan personil (*skill*), Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan juga Masyarakat dan budaya. Sesuai dengan hasil analisis pada putusan No. 2220/Pid.Sus/2016/PN-Mdn memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan terdakwa AMER HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan bermufakat menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram, dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

BY

SUARDIN LASE

13.840.0031

THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

Narcotics is a substance or drug that is very useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, if misused or used is not in accordance with the standard of treatment can cause adverse consequences for individuals or society, especially the younger generation. Narcotics has useful and useful properties used in the fields of medicine, health and medicine and is useful in research of the development of pharmaceutical science or pharmacology. Based on the elements and the division of criminal acts then the act of circulation or abuse of narcotics is included in a crime. The formulation of the problem is how law enforcement based on Law No. 35 of 2009 on narcotics, law enforcement obstacles for the perpetrators of narcotic crime and judges' judgment in deciding the punishment for the perpetrators of narcotic crime. To discuss this problem, the research is done by using library research method, by doing research on various sources of written reading, and Field Research method by taking Decision No: 2220 / Pid.Sus / 2016 / PN -MdnNamely the case of criminal narcotics related to the title of this thesis. Further analyzed qualitatively then the data obtained from the respondent or information generate data descriptive analysis so researched and studied as something intact. From result of research and discussion explain to law enforcement based on Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, As a user Subject to criminal provisions under article 116, distributors or intermediaries of criminal provisions under article 114, producers of criminal provisions pursuant to Article 113 of Law No. 35 of 2009. Barriers to law enforcement for narcotics offenders are generally: The adequacy of the skill, facilities or facilities that support law enforcement, as well as the Society and culture. In accordance with the results of analysis on decision No. 2220 / Pid.Sus / 2016 / PN-Mdn notes Article 114 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1) of RI Law no. 35 of 2009 on Narcotics, Law no. 8 of 1981 on criminal procedural law and other relevant laws, stating the defendant AMER HASYIM has been proven legally and convincingly guilty of unlawful and unlawful crime by agreeing to accept or mediate in the sale and purchase of Narcotics Group I instead of plants, Weighing more than 5 grams, and the judges handed down the defendant to a maximum 10 (ten) years imprisonment of Rp. 1.000.000.000, - (one billion rupiah) provided that the unpaid penalty must be replaced with imprisonment for: 3 (three) months and charge the case to the defendant Rp. 2,000 (two thousand rupiah).

Keywords: Criminal Law Enforcement, Narcotics Crime.